



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021- 2026**



**KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

DAFTAR ISI

SAMPUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS P2KBP2PA KABUPATEN KENDAL KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DA PERLINDUNGAN ANAK	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
	2.2 Sumber Daya Dinas P2KBP2PA Kabupaten Kendal	23
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP2PA Kabupaten Kendal	26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P2KBP2PA	34
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS P2KBP2PA	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP2KBP2PA	36
	3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	37
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kendal	51
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII	PENUTUP	105
	1.1 Pedoman Transisi	105
	1.2 Kaidah Pelaksanaan	105
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tata cara penyusunan Renstra diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Strategis yang mengacu pada Rancangan Awal RPJMD, RPJPD 2005 – 2025, RPJMN 2014 – 2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra 5 tahun yang lalu, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan UU No 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera bukan merupakan urusan wajib yang memiliki Standar Pelayanan Minimal. Sehingga SPM Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Anak dan SPM Keluarga Berencana tidak menjadi SPM bagi urusan tersebut diatas. Namun demikian indikator tersebut dalam SPM masih digunakan menjadi indikator dalam pembangunan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Renstra Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026, secara rutin telah dilakukan pengendalian dan evaluasi oleh Bappeda/Baperlitbang Kabupaten Kendal. Berdasarkan pengendalian dan evaluasi tersebut memberikan

kesimpulan bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Kendal akan dilakukan perubahan atau revisi. Perubahan dokumen RPJMD tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD untuk jangka waktu tahun rencana 2023, 2024, 2025 dan 2026, yang memuat Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, target dan pendanaan indikatif dengan mengacu kepada perubahan RPJMD Kabupaten Kendal dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Perangkat Daerah, maka disusunlah Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tentunya berkewajiban menyusun perubahan Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050 – 5889 Tahun 2021 terkait Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tentunya berkewajiban untuk menyusun perubahan renstra Perangkat Daerah dengan menyesuaikan Kepmendagri Perda dan Perbup tusi tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Batas dengan mengubah Undang – Undang No 13 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4700);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 16 dan Hal Pembentukan daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah/ barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 77, Tambahan Lembaran Negara NO 6042).,
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan – Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);
23. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Daerah No : 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal;
28. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Perbup No : 95 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mensinergikan pembangunan selama lima tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisi uraian tentang tugas fungsi dan struktur, sumberdaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan, peluang dan tantangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Berisi uraian ringkas tentang identifikasi dan permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan, telaah visi misi Bupati / Wakil Bupati, Telaah Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, telaah rencana tata ruang dan wilayah kabupaten Kendal, telaah kajian lingkungan hidup strategis Kab. Kendal, penentuan isu – isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Bakeuda Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal.

BAB VIII Penutup

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal

1. Tugas

Susunan Organisasi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal berdasarkan Perda Nomor 95 Tahun 2021 adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk , keluarga berencana ,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal termuat dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Penjabaran tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrative di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta implementasinya sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta implementasinya sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggara dan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menangani bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan sebagai akibat pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Mengupayakan insifikasi dan ekstensifikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna menunjang pembangunan Daerah;
- l. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai

ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

a) Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitas kegiatan di bidang perencanaan, monitoring,

evaluasi, pelaporan, system informasi dinas, dan administrasi keuangan.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

a). Sub Koordinator Jaminan ber-Keluarga Berencana

Sub Koordinator Jaminan ber-Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sub Koordinator Jaminan ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jaminan ber-Keluarga Berencana.

b). Sub Koordinator Kesertaan ber-Keluarga Berencana

Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana.

c). Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

- a) Sub Koordinator dan Penggerakan

Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang advokasi dan penggerakan.

- b) Sub Koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan

Sub Koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Kepala Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitas, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan.

- c) Sub Koordinator Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga

Sub Koordinator Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Sub Koordinator Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga.

5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- a) Sub Koordinator Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak.

- b) Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

- c) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak

Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakannya teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kelompok Bidang, Sekretaris yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang ketrampilan dan jenjang keahlian.
- d. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- e. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tata Kerja

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- b. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- c. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing .
- d. Dalam hal setelah dilakukan pengawasan terjadi penyimpangan, pimpinan unit organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- f. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- g. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- h. Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- i. Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

8) Struktur Organisasi

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal maka dapat dilihat pada bagan berikut ini :

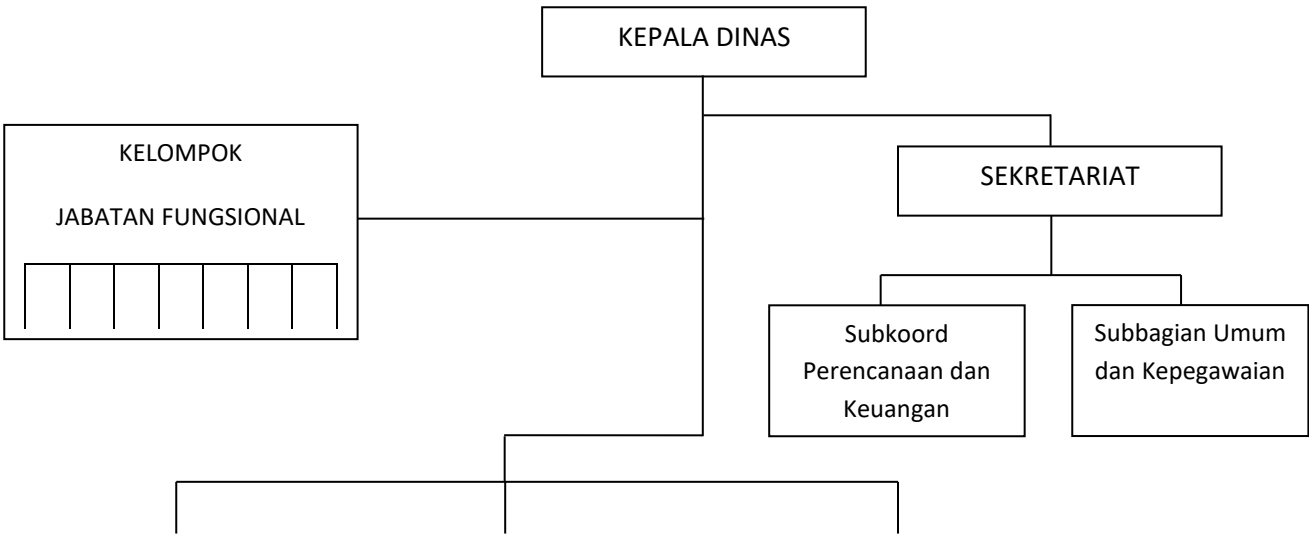
1) Kepala Dinas

2) Sekretariat yang membawahkan :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
- b. Subagian Umum dan Kepegawaian

- 3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , yang membawahkan :
 - a. Sub Koordinator jaminan ber – Keluarga Berencana
 - b. Sub Koordinator Pembinaan Kestaraan ber – Keluarga Berencana
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga
- 4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga , yang membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan
 - b. Sub Koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan
 - c. Sub Koordinator Ketahanan , Kesejahteraan dan kualitas Keluarga
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yang membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pengarus utamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
 - b. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - c. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal maka dapat dilihat pada bagan Sbb:





2.2 Sumberdaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal

1. Sumber Daya Manusia

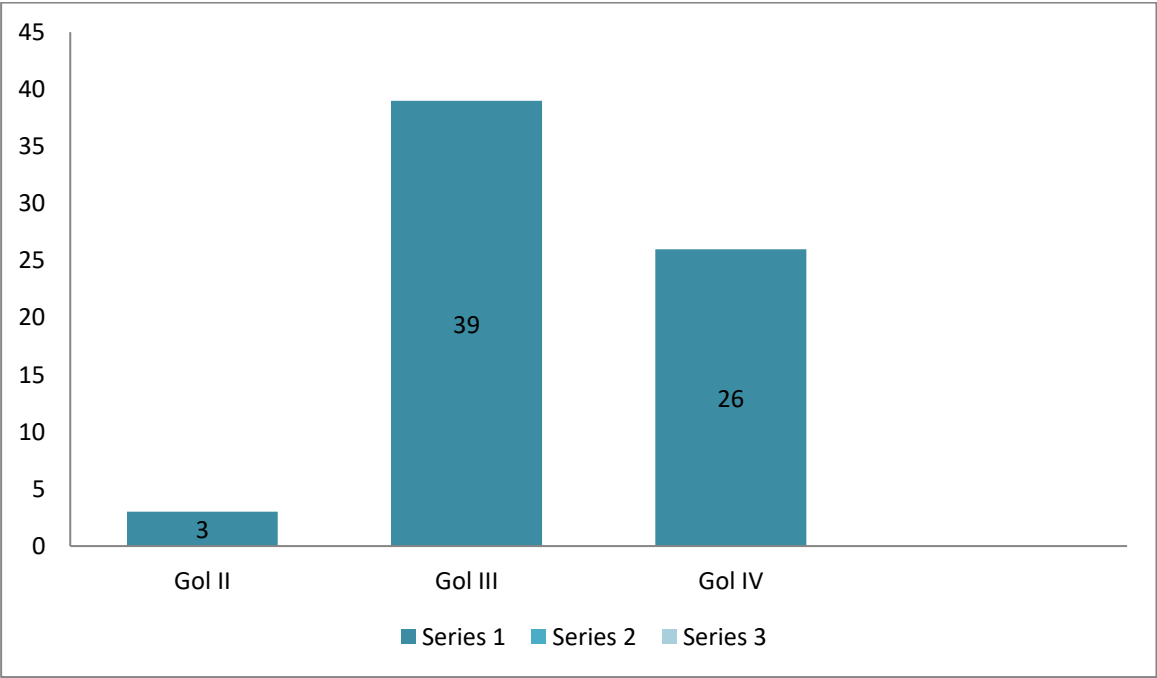
Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Jumlah Personil di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sebanyak 68 orang berstatus PNS (42 adalah jabatan fungsional penyuluh KB dengan status Pegawai Pusat/BKKBN), dan 7 orang berstatus Tenaga Penunjang Kegiatan. Adapun rincian SDM yang berstatus PNS adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Komposisi PNS di DP2KBP2PA Kab. Kendal
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mei Tahun 2021
Sumber: DP2KBP2PA Kab. Kendal Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar PNS di Kendal berpendidikan S1 yaitu 49 orang (60%), kemudian berpendidikan SMA sebanyak 13 orang, S2 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 1 orang, dan hanya berpendidikan SMP sebanyak 1 orang, SD tidak ada.



Gambar 2.2

PNS Berdasarkan Golongan di DP2KBP2PA Kab. Kendal Tahun 2021

Sumber: DP2KBP2PA Kab. Kendal Mei Tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS di DP2KBP2PA Kabupaten Kendal sebagian besar masuk dalam golongan III, kemudian berikutnya golongan IV, dan paling sedikit adalah golongan II.

Rincian dari SDM yang ada di DP2KBP2PA Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1.	Kepala Dinas	: 1 orang
2.	Sekretaris	: 1 orang
3.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
4.	Ka.Subag Umum & Kepeg	: 1 orang
6.	Sub Koordinator	: 9 orang
7.	Kabid	: 3 orang
8.	Staf	: 6 orang
9.	Petugas lapangan (PLKB)	: 38 orang
10.	Tenaga Penunjang Kegiatan	: 15 orang

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas DP2KBP2PA masih sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Aset yang Dimiliki Oleh DP2KBP2PA B Kab. Kendal Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
1	Tanah	3	baik
2	PERALATAN DAN MESIN	1.046	
	1. Alat angkutan	94	baik
	2. Alat bengkel & Alat ukur	9	baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
	3. Alat pertanian	25	baik
	4. Alat Kantor & Rmh Tangga	883	baik
	5. Alat studio Komunikasi & Pemancar	116	baik
	6. Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	657	baik
	7. Alat Laboratorium	50	baik
	8. Alat Persenjataan	1	
	9. Alat Komputer	194	baik
	10. Honda Supra 125	38	baik
	11. Yamaha Jupiter	41	baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	42	baik
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		
	1. Tugu Titik Kontrol / pasti	2	baik
	2. Jalan dan Jembatan	3	baik
	3. Instalasi	1	baik
	4. Jaringan	1	baik

Sumber: DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal

1. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Untuk mencapai misi ketiga RPJMD 2016 - 2021 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka

Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Program dan Kegiatan

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - (a) Sosialisasi Desa Layak Anak
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - (a) Evaluasi Pelaksanaan PUG.
 - (b) Penunjang Kegiatan Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kendal.
 - (c) Penguatan Kelembagaan PPTPKPA.
 - (d) Evaluasi Penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - (a) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Melalui Pengetahuan Kesehatan Perempuan.
 - (b) Advokasi / pendampingan dan bantuan hukum korban kekerasan.
 - (c) Pembinaan dan Pelatihan BKTKI (Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia).
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
 - (a) Pembinaan Organisasi Wanita.

b) Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melihat capaian indikator kinerja. Capaian Indikator Kinerja tahun 2020 adalah :

Tabel 2.2

Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2020

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentasi Kelembagaan PUG Yang Aktif	%	36,58	37,69	50,80	64,01	60,00
2	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,97	47,54	52,9	49,91	22,22
3	Presentase partisipasi perempuan di lembaga legislative	%	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
4	Rasio KDRT perempuan dan anak	%	0,04	0,02	0,02	0,04	0,03
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	/ 100.00 perempuan	7,00	6,69	4,07	10,59	4,96T
6	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	3,85	6	7,34	9,19	8
7	Cakupan Pengelola Industri Rumahan (IR) yang mendapatkan p-elatihan ketrampilan	%	22,38	26,66	34,42	35,96	33
8	Jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9	Indek Perlindungan Anak	Indek	75	50	41	53	33
10	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100

(Sumber data : Baperlitbang, Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019)

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja :

Indikator agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indek Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Pada pembahasan ini terlihat bahwa IPG dan IDG Kabupaten Kendal belum optimal, Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan belum responsive gender. Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang mengawal perencanaan yang responsive gender hanya 60 % yang aktif.

Kekerasan perempuan dan anak masih ditemukan di Kabupaten Kendal. Sampai dengan 2020 KDRT perempuan dan anak sebesar 0.03%. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dapat dilaksanakan dengan Desa layak Anak. Sampai dengan tahun 2020 Desa Layak Anak yang terbentuk baru mencapai 8%.

1. Adanya kesadaran masyarakat pada pelaporan tindak kekerasan dan tertangani dengan cepat sehingga capaian memenuhi target.
2. Tingkat keaktifan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan sudah ikut dalam penilaian penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE) namun belum berhasil meraih penghargaan karena belum ada Perda atau Perbup yang menjadi dasar penilaian.
3. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah sudah memenuhi target kinerja.
4. Adanya partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah yang baik (100%)
5. Rasio KDRT dan anak sesuai dengan capaian kinerja (0,04) karena semakin adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan perempuan dan anak .
6. Cakupan pengelola industry rumahan (IR) yang mendapat pelatihan ketrampilan semakin meningkat karena kesadaran masyarakat untuk bisa memenuhi ekonomi keluarga.

2. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Kendal

Program dan kegiatan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - (a) Penyediaan Jasa Surat- Menyurat.
 - (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik.
 - (c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - (d) Penyediaan alat tulis kantor.
 - (e) Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan.
 - (f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - (g) Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan.
 - (h) Penyediaan makan dan minum.
 - (i) Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (a) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin.
 - (b) Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - (a) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
 - (a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur.
 - (b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
- 5) Program Keluarga Berencana
 - (a) Bhakti KB Kes Bhayangkara dan TMKK
 - (b) Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga
 - (c) Penunjang Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Petugas Lapangan
 - (d) Keluarga Berencana (DAK)
 - (e) Operasional Pelayanan KB Melalui MUYAN
 - (f) Bantuan Operasional Keluarga Berencana
 - (g) Kegiatan Pembinaan PPKBD
 - (h) Pengembangan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Termasuk Genre Melalui Berbagai Media

- (i) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- (j) Pembinaan Kampung KB.
- 6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - (a) Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kendal
 - (b) Evaluasi Pelaksanaan PUG
 - (c) Penunjang Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan di Kab. Kendal
 - (d) Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender bagi SKPD
 - (e) Penguatan Kelembagaan PPTPKPA
 - (f) Evaluasi Penilaian KLA (Kabupaten Layak Anak)
- 7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - (a) Peningkatan Kualitas Hidup perempuan melalui pengetahuan kesehatan Perempuan
 - (b) Advokasi / pendampingan dan bantuan hukum korban kekerasan
 - (c) Pembinaan dan Pelatihan BKTKI (Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia)
- 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - (a) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Melalui Pengetahuan Kesehatan Perempuan
 - (b) Advokasi / pendampingan dan bantuan hukum korban kekerasan
 - (c) Pembinaan dan Pelatihan BKTKI (Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia)
- 9) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
 - (a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - (a) Pelatihan Teknik Konseling bagi Pengelola PIK Remaja

(b) Capacity Building Program Genre Bagi Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS _ PIK Remaja Tahap Tegak dan Tahap Tegar

11) Program Penyiapan Program Pendamping Kelompok Bina Keluarga

(a) Sosialisasi Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS Paripurna

(b) Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melihat Capaian Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja tahun 2020 adalah :

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio akseptor KB (baru)	%	100	78,42	70	77,91	84,57
2	Cakupan peserta KB aktif 9m-CPR)	%	80,9	81,1	69,45	69,35	70,26
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	79,23	79,25	79,12	79,28	79,1
4	Cakupan Pasangan Usia Subur Yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,45	0,42	0,98	1,15
5	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,89	9,87	11,83	18,34	15,77
6	Angka pemakaian kontrasepsi pria /CPR bagi pria	%	1,28	1,05	1,16	1,16	1,38
7	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	62,07	64,83	64,83	67,13	69,23

NO	INDIKATOR	SAT UAN	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Presentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	26	28,89	33,3	26,6	29,3
9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	87,81	86,8	87,24	84,1	85,1
10	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11	Presentase penurunan usia pernikahan dini	%	NA	NA	NA	NA	NA
12	Cakupan PIR R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	21	22	24	26,6	28,8
13	Presentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)	%	78,9	80	80	80	80

(Sumber data : Baperlitbang, Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026)

Penjelasan Tingkat capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.

1. Cakupan PUS dengan Usia Istri kurang dari 20 tahun cukup tinggi, hal ini didukung dengan peran PIK baik jalur sekolah maupun jalur masyarakat sehingga mencegah usia pernikahan Dini, Bebas Rokok , Seks Bebas dan Narkoba.
2. Capaian kurang dari 90% pada capaian peserta KB Baru , Peserta KB aktif dan Unmetneed yang tinggi (183,4%), terjadi dikarenakan Target Peserta KB Baru dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah cukup besar, sementara Jumlah PLKB tinggal 42 orang, namun telah diambil langkah lebih

mengefektifkan peran kader KB (PPKBD) di 286 Desa/Kelurahan.

3. Peran PIK Remaja dalam pelayanan informasi dan konseling (100%) sangat berpengaruh dalam berbagai aspek diantaranya pada PUS dengan usia Istri dibawah 20 tahun.
4. Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) cukup tinggi (105,12%) dikarenakan adanya berbagai pelatihan sehingga bisa menopang ekonomi keluarga.

Pengendalian penduduk dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana . Indikator keluarga berencana sampai dengan tahun 2020 dengan capaian cukup baik. Rasio akseptor KB baru saampai dengan 2-2- telah mencapai 84,57 %, cakupan peserta KB aktif baru mencapai 70,26 % sampai dengan tahun 2020 dan masih perlu mendapat perhatian adalah kesertaan KB bagi laki laki belum optimal (tahun 2020 mencapai sebesar 1,38%, capaian ini masih dibawah target nasional sebesar 3%.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki isteri dibawah usia 20 tahun angkanya cukup bagus sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,15 %. Keberhasilan ini dikarenakan semalik efektifnya peran Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK KRR dalam memberikan edukasi dalam upaya mencegah perkawinan usia dini dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan generasi Z.

2.4 Tantangan dan Peluang :

Peluang dan Tantangan yang di hadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah :

Peluang :

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan.

Tantangan :

Kualitas hidup dan peran perempuan serta anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah . Hal itu antara lain ditandai oleh :

- a. Tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- b. Kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

Dengan demikian , tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA)**

Permasalahan pada masing-masing program sesuai dengan kewenangan Disdalduk KB,PPPA adalah:

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat, masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2020 sebesar 0,03%.
2. Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak Anak, hal ini karena pada tahun 2020 baru sebesar 8 % cakupan pembentukan desa layak anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari cakupan IR yang mendapat pelatihan baru;
4. Belum optimalnya pelaksanaan PUG, tahun 2020 kelembagaan PUG yang aktif sebesar 60 %. Hal ini dapat dilihat dari masih belum aktifnya pokja PUG, gugus tugas KLA, focal point Gender dan Forum anak;

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Masih tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten Kendal (2,2)
2. Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB (1,38%)
3. Masih cukup tingginya angka unmetneed KB. Berdasarkan data 2020 adalah 15,77 %
4. Belum optimalnya cakupan bina keluarga balita (BKB), tahun 2020 sebesar 70,26 %
5. Masih rendahnya cakupan kampung KB, hanya 42 desa dari 286 desa.
6. Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), baru 3 SMA yang sudah mengintegrasikan SSK sebagai mata pelajaran.

7. Masih lemahnya peran dan fungsi keluarga sehingga masih adanya keluarga yang melahirkan dalam kondisi stunting, angka keluarga beresiko stunting adalah 81.890.

Berdasarkan RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) sebagai turunan dari perpres Nomor : 72 tahun 2021. DP2KBP2PA Kabupaten Kendal adalah sebagai motor penggerak Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama lima tahun (2021 - 2026) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yaitu :

"Kendal, Handal, Unggul, Makmur Dan Berkeadilan"

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu sebagai berikut :

HANDAL, Menjadikan kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

UNGGUL, SDM Berkualitas religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

MAKMUR, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal..

BERKEADILAN, Pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan visi "Kendal, Handal, Unggul, Makmur Dan Berkeadilan" ” 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-2 yaitu *Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0*

Rincian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran jangka menengah daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, Kabupaten Kendal yang Terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industry 4,0		
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
1. Meningkatnya Pembangunan Yang	1. Meningkatnya partisipasi	1. Program Pengarusutamaan

Berkeadilan dan Responsif Gender peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Anak Khusus	kelembagaan PUG dan PUHA	Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Melalui Pengendalian Jumlah Penduduk, dan Peningkatan Peserta KB	2. Meningkatnya Penangan kasus kekerasan perempuan dan Anak 3. Meningkatnya Penangan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus 4. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS 5. Peningkatan layanan kesertaan ber KB bagi PUS	2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kendal terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB khususnya di pedesaan;

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB, khususnya kader-kader posyandu;
3. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap alat kontrasepsi untuk mencapai cakupan KB Mandiri;
4. Meningkatkan peran laki-laki melaksanakan vasektomi.

Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kendal terkait dengan sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak adalah:

1. Mewujudkan upaya penegakkan HAM, penghapusan kekerasan dan perlindungann terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya perlindungan secara terpadu korban kekerasan bagi perempuan dan anak
3. Meningkatkan capaian kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan legislatif, implementasi PPRG, pengembangan jaringan Forum PUG, Forum Anak, Desa Layak Anak dan pemenuhan hak-hak anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan.

Tabel 3.2
Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Kendal beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Visi: Mewujudkan KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2, Mewujudkan sumber daya manusia yang	• Belum optimalnya perlindungan terhadap	• Rendahnya kesadaran dan kemauan kaum	• Meningkatnya kesadaran masyarakat

	cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0	perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2020 sebesar 0,03% • Masih belum optimalnya perwujudan kabupaten Kabupaten Layak Anak, hal ini karena pada tahun 2020 baru sebesar 8% cakupan pembentukan desa layak anak • Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari cakupan IR yang mendapatkan pelatihan baru • Belum optimalnya pelaksanaan PUG, tahun 2020 kelembagaan PUG yang aktif sebesar 60%. Hal ini dapat dilihat dari masih belum aktifnya	pria untuk berperan dalam program keluarga berencana • Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun • Kemampuan menyediakan dan biaya pemasangan alat kontrasepsi belum optimal • Kesadaran dari SKPD untuk menerapkan kebijakan yang responsive gender masih belum optimal • Kelembagaan PUG yang ada belum berfungsi secara aktif • Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan	untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana • Semakin menurunnya jumlah unmetneed • Adanya amanat dari pusat dan provinsi untuk meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan yang responsive gender • Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat • Tersedianya unit
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan 4. Program peningkatan kualitas keluarga 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	pokja PUG, gugus tugas KLA focal point Gender dan forum anak	anak adalah ranah pribadi sehingga tidak perlu dilaporkan.	pelayanan terpadu penanggulang an kekerasan
7. Program Perlindungan Khusus Anak	• Masih tingginya Total Fertility rate dalam rangka pengendalian	• Angka kemiskinan dan pengetahuan tentang Dampak buruk stunting	• Sedang di susunya Peraturan Daerah
8. Program Pengendalian Penduduk	kelahiran di Kabupaten Kendal (2,2)		• Memberikan Sosialisai di tingkat desa dan bantuan makanan yang bergizi
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	• Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasilaki-laki ber KB (1,38%)		
10. Program Pemberdayaa n Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	• Masih cukup tingginya angka unmeetned KB. Berdasarkan data 2020 adalah 15,77 % • Belum optimalnya cakupan bina keluarga balita (BKB) tahun 2020 sebesar 70,26% • Belum adanya dokumen GDBK (Grand Design Pembagunan Kependudukan) • Masih rendahnya cakupan kampung		

		KB hanya 42 desa dari 286 Desa. • Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) baru 3 SMA yang sudah mengintegrasikan SSK sebagai mata pelajaran.		
--	--	--	--	--

Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

1. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

A. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional

B. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);

- a. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- b. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- c. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan - 57 - kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

• Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

• **Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana**

**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG tidak dapat dicapai oleh satu Dinas, sementara Pokja PUG belum optimal	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• Masih kurangnya kapasitas SDM dalam mencapai IDG	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tindak kekerasan terhadap anak	dan anak	
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Masih belum tersusunya kebijakam perlindungan khusus anak	Terbatasnya personil yang memiliki kapasitas	Adanya komitmen Pemimpin
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan Visi dan Misi Pemerintah Periode tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju” yang menjadi acuan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan harus dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L periode tahun 2020-2024.

- A. Visi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang mengandung harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.
- B. Misi Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:
 - 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 - 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
 - 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
 - 3) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - 4) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
 - 5) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 - 6) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
 - 7) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
 - 8) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap

konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia)

Sasaran Strategis Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024. 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Tabel 3.4

**Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap**

**Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengalami peningkatan
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.	Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini dilihat dari cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi baru mencapai 27,74%	Kemampuan daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas dan penyediaan biaya pemasangan kontrasepsi	Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan droping Alat Kontrasepsi dari Pusat

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		belum optimal	
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya angka unmeetned KB. Pada tahun 2020 unmeetned sebesar 15,77%	Banyaknya PUS yang tidak tidak ikut ber-KB	Sosialisasi program Keluarga Berencana selalu dilaksanakan
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	Masih banyaknya Jumlah PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Belum optimalnya peran PIK R dalam melakukan kegiatan dan penyuluhan konseling	Seluruh kecamatan telah memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).			

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kendal

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal tidak berpengaruh pada

pemanfaatan tata ruang dan wilayah Kabupaten Kendal seperti yang termuat dalam Perda RT RW.

B. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kendal

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal tidak berpengaruh dan tidak berimplikasi pada kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Dari hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, serta telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, maka dapat diambil beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Apabila dibuat tabel, akan terlihat sbb :

Tabel 3.4

Isu – Isu Strategis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sbb :

No	Isu – Isu Strategis	Bidang Urusan
1	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2020 sebesar 0,03 %	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak Anak, hal ini karena pada tahun 2020 baru sebesar 8% cakupan pembentukan desa layak anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari cakupan IR yang mendapat pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2020 ini masih banyak perlu pembinaan dan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	pelatihan mengingat munculnya pelaku IR baru;	
4	Belum Optimalnya pelaksanaan PUG, tahun 2020 kelembagaan PUG yang aktif sebesar 60%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Masih tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten Kendal (2,2)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB (1,38%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Masih cukup tingginya unmet need KB (1,38%)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Belum optimalnya cakupan bina keluarga balita (BKB), tahun 2020 sebesar 70,26 %	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Masih rendahnya cakupan kampung KB, hanya 42 desa dari 286 Desa	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), baru 3 SMS yang sudah mengintegrasikan SSK sebagai mata pelajaran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Masih lemahnya peran dan fungsi keluarga sehingga masih adanya keluarga yang melahirkan dalam kondisi stunting angka keluarga beresiko stunting adalah 81.890	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Misi yang mendukung tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah :

1. Peningkatan Pembangunan yang berkeadilan dan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus;
2. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berikut rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dihasilkan dan disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026

Visi : Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan SUMBER REFERENSI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA/ SASARAN TAHUN KE-						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, Hal ini dapat dilihat masih di tentukannya kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2020 sebesar 0,03 %	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	Meningkatkan partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	9285	92,95	93,5	93,1	93,2	93,3	93,4	1. Peningkatan kesertaan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan perlindungan Anak khusus	Memberikan memenuhi dan mejalin pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sertamampu meningkatkan kesejahteraan	1. PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 4. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5. PEMENUHAN HAK ANAK 6. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 7. PENGENDALIAN PENDUDUK 8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	Masih belum optimalnya perwujudan KLA, hal ini karena pada tahun 2020 baru sebesar 8% cakupan pembentukan Desa Layak Anak	peningkatan perlindungan perempuan dari	Meningkatkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.		2	Prosentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	1000			
3	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga hal ini dapat dilihat dari cakupan IR yang membuat pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2020 ini masih banyak perlu pembinaan	Kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan	Meningkatkan penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk perempuan	4,96	20	20	20	20	20	20			

10	Masih rendahnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) baru 3 Sekolah yang mengintegrasikan SSK sebagai mata pelajaran																	
11	Masih lemahnya peran dan fungsi keluarga sehingga masih adanya keluarga yang melahirkan dalam kondisi stunting angka keluarga beresiko stunting adalah 81.890																	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi :

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kendal. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang diambil oleh Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan dan meningkatkan peran lembaga PUG dan PUHA melalui pembentukan kelembagaan dan peningkatkan kapasitas (pelatihan, workshop), peningkatan perencanaan yang responsif gender, peningkatan Kabupaten Layak Anak, penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan peran perempuan rentan (lansia, miskin dan korban bencana) dalam pemberdayaan perempuan, pembentukan kecamatan ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, mendorong pembentukan ruang bermain ramah anak, sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak.
2. Mengoptimalkan peran lembaga penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas PPT sampai tingkat desa/kelurahan, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana penanganan korban kekerasan, peningkatan jejaring penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan akseptor KB, pemberian dan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis pada penduduk miskin, dan peningkatan peran laki-laki dalam ber KB serta peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan metode yang lebih baik, peningkatan ketahanan keluarga dengan peran kelompok Bina Keluarga Balita, Lansia dan Remaja.

B. Arah Kebijakan :

Adapun Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembentukan focalpoint di masing masing SKPD, meningkatkan peran PUG dan gugus tugas, pembentukan forum anak pada kecamatan dan kelurahan yang belum memiliki.
2. Meningkatkan peran lembaga penanganan korban kekerasan perempuan dan anak sampai ke tingkat kelurahan/desa.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber-KB dengan prioritas pada peran laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi dan optimalisasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Dengan kegiatan :

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan sbb :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
 - 2. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7. Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - 4. Pengadaan Mebel
 - 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pendaratan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Mebel
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dengan kegiatan :

- A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 4. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan sbb :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- A. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sbb :
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Dengan kegiatan :

- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sbb :
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sbb :
 - 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sbb :
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- B. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota:

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
3. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
4. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
5. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
6. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan

7. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- B. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System / Peringatan Dini).
 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 1. Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja
 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- B. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- C. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 5. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 6. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
 7. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 8. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 9. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 10. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- D. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 4. Pembinaan Terpadu Kampung KB

X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 2. Orientasi dan Pelatihan Teknis P+
 3. engelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 8. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- B. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Tabel 6.1
Target Kerangka dan Pendanaan DP2KBP2PA Kab. Kendal Sebelum Perubahan

Tabel 6.1
Target Kerangka dan Pendanaan DP2KBP2PA Kab. Kendal Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya Pembangunan yang berkeadilan dan responsif Gender peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus																					

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji setiap bulan terbayarkan	Bulan	4.927.635	100 %	4,744,681	100%	4,744,681	100 %	4,754,681	10 0%	5,754,681	100%	6,771,681	100 %	7,250,000	100%	34,020,405	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Pegawai DP2KBP2PA	Jenis	2,000	2 jenis	3,000	2 jenis	3,000	2 jenis	4,000	2 jenis	4,000	2 jenis	4,000	2 jenis	5,000	12 Jenis	23,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor yang dibeli	Jenis	50,000	57 Jenis	35,156	57 Jenis	35,157	57 Jenis	50,000	57 Jenis	50,000	57 Jenis	50,000	57 Jenis	55,000	342 jenis	275,313	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan mengadakan makan dan minum pegawai, tamu dan rapat	Bulan	20,000	12 Bulan	19,445	12 Bulan	19,445	12 Bulan	25,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	25,000	12 Bulan	25,000	72 Bulan	133,890	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang diadakan	Jenis	13,000	13 Jenis	6,534	13 Jenis	11,494	13 Jenis	20,000	13 Jenis	20,000	13 Jenis	20,000	13 Jenis	27,000	78 Jenis	105,028	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan konsultasi dan kordinasi baik dalam maupun luar darah	Bulan	200,000	12 Bulan	103,127	12 Bulan	86,602	12 Bulan	125,000	12 Bulan	125,000	12 Bulan	125,000	12 Bulan	125,000	72 Bulan	689,729	
			Bimbinga Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang perundang-undangan	Tahun	-	1 Tahun	125,000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	6 Tahun	125,000	
			Pernatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah peserta pelatihan arsip dinamis SKPD	Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	100,000	1 Tahun	100,000	1 Tahun	100,000	1 Tahun	125,000	1 Tahun	125,000	6 Tahun	550,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebeuler kantor	Tahun	-	1 tahun	1,050	1 tahun	1,050	1 tahun	5,000	1 tahun	5,000	1 tahun	5,000	1 tahun	5,000	6 Tahun	22,100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perawatan rutin gedung dan bangunan	Tahun	17,000	1 Tahun	12,000	1 Tahun	16,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	20,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000		123,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan dan mesin	Tahun	80,000	1 Tahun	73,085	1 Tahun	73,085	1 Tahun	100,000	1 Tahun	100,000	1 Tahun	125,000	1 Tahun	125,000	6 Tahun	596,170	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Laptop	Unit	20,000	4 Unit	9,966	4 Unit	200,000	4 Unit	100,000	7 Unit	80,000	8 Unit	80,000	10 Unit	80,000	37 Unit	549,966	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya tenaga driver dan penjaga malam	Tahun	50,000	1 Tahun	123,454	1 Tahun	123,454	1 Tahun	150,000	1 Tahun	140,000	1 Tahun	145,000	1 Tahun	145,000	6 Tahun	826,908	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Mebeuler	Tahun		1 Tahun	17,900	1 Tahun	17,900	1 Tahun	20,000	1 Tahun	7,000	1 Tahun	10,000	1 Tahun	10,000	6 Tahun	82,800	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan kegiatan perkantoran (surat menyurat)	Tahun	2,000	1 Tahun	2,160	1 Tahun	2,160	1 Tahun	3,000	1 Tahun	3,000	1 Tahun	3,000	1 Tahun	3,007	6 Tahun	16,327	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penggunaan Fasilitas Telp , Air , Listrik untuk kegiatan perkantoran	Tahun	135,000	1 Tahun	129,155	1 Tahun	129,155	1 Tahun	150,000	1 Tahun	135,000	1 Tahun	140,000	1 Tahun	140,000	6 Tahun	823,310	
	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																		
	Meingkatnya Penanganan kasus kekerasan dan anak		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan pelaksanaan PUG	-	-	50	163,425	60	41,075	70	50,000	80	48,000	90	50,000	100	50,000	450	402,500	DP2KBP2 PA Kab Kendal

	Meningkatnya kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan PUG	-	-	40	41,075	45	-	50	-	55	-	65	-	75	-	330	41,075	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	-	-	40	122,350	45	41,075	50	50,000	55	48,000	65	50,000	75	50,000	330	361,425	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi kebijakan pendampingan pug	-	-	30	-	40	-	50	-	60	-	70	-	80	-	330	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kebijakan Penganggaran Bagi Perempuan	desa	-	25 desa	-	25 desa	-	25 desa	-	25 desa	-	25 desa	-	25 desa	-	150 desa	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengetahuan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	43 organisasi	120,000	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 Organisasi	-	258 organisasi	120,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatkan pengetahuan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	43 organisasi	120,000	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	258 organisasi	120,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatkan pengetahuan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	43 organisasi	-	258 organisasi	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengetahuan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	43 organisasi	274,385	43 organisasi	274,385	43 organisasi	280,000	43 organisasi	280,000	43 organisasi	290,000	43 organisasi	290,000	258 organisasi	1,688,770	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	-	-	210	100,000	220	100,000	230	100,000	240	100,000	250	110,000	260	110,000	1,410	620,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dan Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan	-	-	2 desa	75,635	4 desa	75,635	6 Desa	80,000	8 Desa	80,000	15 Desa	80,000	25 desa	80,000	60 Desa	471,270	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	-	100	300	98,750	350	98,750	370	100,000	390	100,000	420	100,000	440	100,000	2,270	597,500	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				529,010			93,705		100,000		100,000		100,000		100,000		1,022,715	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan supaya tidak adanya korban kekerasan	-	13,500,000	20	77,180	25	93,705	30	100,000	35	100,000	45	100,000	55	100,000	210	570,885	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan bagi perempuan dan anak	-	-	40	451,830	45	-	50	-	55	-	65	-	75	-	330	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				-		169,165		169,165		169,165		170,000		170,000		847,495	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	-	-	-	40	-	50	-	55	-	65	-	75	-	285	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Untuk penanganan khusus bagi korban di berikan rujukan	-	-	-	40	169,165	50	169,165	55	169,165	65	170,000	75	170,000	285	847,495	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-		-	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan bagi koban kekerasan masih berkurang	-	-	0	50	-	50	-	50	-	65	-	75	-	290	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Memberikan penanganan lebih cepat	-	-	0	40	-	50	-	55	-	65	-	75	-	285	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingi Kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	30	-	30	-	30	-	40	-	50	-	180	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingi Kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																	

			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					89,017		89,017		105,000		100,000		105,000		105,000		593,034	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan di berikan perlindungan anak	-	23,000,000	40	59,125	45	59,125	50	65,000	55	65,000	60	65,000	75	65,000	325	378,250	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	memberikan latihan terhadap korban kekerasan	-	-	-	29,892	40	29,892	45	40,000	50	35,000	60	40,000	75	40,000	270	184,892	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	memberikan sosialisasi	-	-	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pusat pembelajaran keluarga	-	-	-	-	10 Desa	-	10 Desa	-	10	-	10	-	10	-	50 Desa	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	diberikan pelayanan yang cepatH46:H47	-	-	-	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	200	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan yang cepat untuk penangan kasus kekerasan	-	-	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	150	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan layanan untuk mendampingi kekerasan dengan pihak terkait	-	-	-	-	35	-	35	-	40	-	50	-	55	-	215	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							-		-		-		-		-		-	

			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	-	-	-	-	40	-	45	-	50	-	55	-	60	-	250	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				185,325		-		-		-		-		-		185,325		
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	terselenggaranya data gender dan anak	100 orang	Tidak ada	-	-	100	-	100	-	100	-		-	-	-	-	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	terselenggaranya pelatihan data gender dan anak	120 orang	Tidak ada program dan kegiatan	120 orang	185,325	150 orang	-	225 orang	-	250 orang	-		-	-	-	185,325		DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				5,705		10,000		20,000		17,000		20,000		20,000		92,705		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Semakin Menguatnya kelembagaan forum anak	Orang	-	-	-	60	-	60	-	60	-		-	-	-	180	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data Data anak di Kabupaten Kendal	orang	Anggaran di Refocusing	20 orang	5,705	30 orang	10,000	30 orang	20,000	30 orang	17,000		20,000		20,000	140 orang	52,705	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					236,575		61,575		80,000		80,000		100,000		100,000		658,150	
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Peserta	-	60	21,575	60	21,575	60	30,000	60	30,000		40,000		40,000	240	103,150	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Desa Layak Anak	9 desa	Anggaran di Refocusing	7 desa	175,000	15 desa	-	15 desa	-	15 desa	-		-		-	52 desa	175,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan Pengasuhan anak	5 Desa	-	-	40,000	5 Desa	40,000	10 Desa	50,000	10 desa	50,000		60,000		60,000	25 Desa	140,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	untuk OPD membantu atas layanan anak	-	23,000,000	40	-	45	-	50	-	55	-		-		-	190	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					-		62,190		70,000		70,000		80,000		80,000		362,190	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping korban kekerasan	-	-	-	-	60	-	60	-	70	-		-		-	190	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping korban kekerasan	-	-	-	-	45	62,190	50	70,000	55	70,000		80,000		80,000	150	202,190	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					70,000		320,000		330,000		320,000		340,000		340,000		1,720,000	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping korban kekerasan	-	-	150	70,000	160	70,000	170	80,000	180	70,000		80,000		80,000	660	450,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang tetangani	-	-	-	-	45	250,000	50	250,000	55	250,000		260,000		260,000	150	1,270,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Forum Anak	-	15,000,000	40 anak	-	50 anak	-	60 anak	-	70 anak	-	-	-	-	-	220 anak	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	pelayanan untuk pendampingan	-	-	40	-	45	-	50	-	55	-		-		-	190	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak	-	-	-	-	45	-	50	-	55	-		-	-	150	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak	-	-	-	-	60	-	50	-	55	-		-	-	165	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan bagi anak yang melakukan kekerasan	-	-	-	-	55	-	50	-	55	-		-	-	160	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal	
Peningkatan Kualitas Kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan peserta KB	1. peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																		
	2. peningkatan layanan kesertaan ber KB bagi PUS		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				46,357		141,617		150,000		130,000		150,000		150,000		767,974		
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	monev RR ke 20 kec	-	-	-	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Penyusunan dan Pemanfaatan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	menyusun rencana kerja tim pokja, pengumpulan dan pengolahan data pokja, pengajuan dokumen ke bupati, rakor persiapan sosialisasi GDPK	dokumen	-	-	4,740	1	100,000	1	100,000	1	80,000	1	90,000	1	90,000	5	464,740	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Pelatihan dan Monev	kali	-	-	-	40	-	40	-	45	-	45	-	45	-	215	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terwujudnya Nota Kerjasama pendidikan kependudukan	dokumen	-	-	-	20	-	20	-	40	-	40	-	40	-	160	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Pelatihan dan sosialisasi SSK serta monev	kali	-	22	-	30	-	35	-	40	-	45	-	45	-	217	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Terwujudnya Nota Kerjasama pendidikan kependudukan	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	pembuatan video kependudukan	paket	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	pembuatan video kependudukan	paket	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Sosialisasi pendidikan kependudukan	kali	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	koordinasi dan monitoring ke sekolah dan paud	kali	-	-	-	5	-	10	-	10	-	10	-	10	-	45	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	koordinasi dan monitoring ke kelompok kegiatan	kali	-	-	41,617	5	41,617	10	50,000	10	50,000	10	60,000	10	60,000	45	303,234	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Pertemuan dengan OPD terkait	kali	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Terselesaikannya sosialisasi	kali	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	sarasehan di desa/kec	gerak	-	20 kec, 286 desa(a(a ngg ara n per uba han)	-	20 kec, 286 desa(a nggara n per uba han)	-	20 kec, 286 desa(a(a ngg ara n per uba han)	-	20 kec, 286 desa(a nggara n per uba han)	-	20 kec, 286 desa(a(a ngg ara n per uba han)	-	20 kec, 286 desa(a nggara n per uba han)	-	120 kec, 286 desa(a nggara n per uba han)	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terselesaikannya rakor	gerak	-	-	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	55	-	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					-		-		-		-		-		-	-		
			Perumusan Parameter Kependudukan	Terselesaikannya perumusan parameter kependudukan	dokumen	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	15	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	pembuatan umpan balik pengendalian lapangan	berkas	-	-	-	288 berkas	-	288	-	288	-	288	-	288	-	1,152	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terselesaikannya profil	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Pemetaan Kependudukan	Terselesaikannya pemetaan	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terselesaikannya Kajian dampak kependudukan	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terselesaikannya pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System/Peringatan Dini</i>)	Terselesaikannya Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System/Peringatan Dini</i>)	dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	membentuk Rumah data di setiap desa	paket	-	-	-	286	-	286	-	286	-	286	-	286	-	1,430	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Tersedianya Data SIGA	Bulan/Kegiatan	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	kegiatan kegiatan	kali	-	-	-	342,447	-	342,447	-	342,447	-	342,447	-	342,447	-	1,712,235	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Input melalui aplikasi SIGA dan SR	berkas	-	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan data keluarga by name by address	data	-	-	-	342,447	-	342,447	-	342,447	-	342,447	-	342,447	-	1,712,235	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	pembuatan umpan balik pengendalian lapangan	berkas	-	-	-	288 berkas	-	288	-	288	-	288	-	288	-	1,152	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	money RR ke 20 kec	gerak	-	-	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
				Pelatihah web kampung KB dan money	kali	-	21	-	22	-	25	-	25	-	25	-	25	-	143	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan pelayanan KB MKJP, Peningkatan pengetahuan PUS	gerak	30	35	58,198	46	1,626,562	51	1,643,364	56	1,643,364	61	1,669,864	61	1,669,864	310	8,311,216	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	sosialisasi dan peningkatan pengetahuan program KKBPK pada stakeholder dan mitra kerja	orang/keg	-	-	-	50	-	50	-	50	-	60	-	60	-	270	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	peningkatan pelatihan teknik konseling PIK Remaja	orang/keg	-	-	-	60	50,000	60	60,000	60	60,000	80	68,000	90	68,000	350	306,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	penyebaran informasi KKBPK	keg			-	5	221,500	5	221,500	7	221,500	7	240,000	7	240,000	31	1,144,500	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	peningkatan pengetahuan tentang Kespro bagi remaja	keg	1	2	58,198	3	58,198	3	65,000	4	65,000	5	65,000	5	65,000	22	376,396	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	penyebaran informasi KKBPK	keg	-	-	-	5	-	5	-	5	-	8	-	10	-	33	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	peningkatan pengetahuan KKBPK	keg	-	-	-	5	-	5	-	6	-	6	-	6	-	28	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kelancaran Operasional Balai Penyuluhan KKBPK	Bulan	-	-	-	240	1,296,864	240	1,296,864	240	1,296,864	240	1,296,864	240	1,296,864	1,200	6,484,320	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya Program Kegiatan KKBPK	Kegiatan	-	-	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	25	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					6,401,823		1,516,675		1,537,800		1,539,800		1,530,800		1,530,800		14,057,698	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	PKB/PLKB dan IMP	Orang	-	1,932	69,250	1932	69,250	1932	70,000	1932	70,000	1932	61,000	1932	61,000	11,592	400,500	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	PKB/PLKB	Paket	-	20 Kecamatan	6,272,948	20 Kecamatan	-	20 Kecamatan	-	20 Kecamatan	-	20 Kecamatan	-	20 Kecamatan	-	-	6,272,948	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	PKB/PLKB	Orang	-	43	59,625	43	74,625	43	95,000	43	97,000	43	97,000	43	97,000	258	520,250	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader IMP	Orang	-	1,889	-	1889	1,372,800	1889	1,372,800	1889	1,372,800	1889	1,372,800	1889	1,372,800	11,334	6,864,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan pemakaian aplikasi SIRIKA tingkat kabupaten dan pemenuhan stock alkon tingkat kab sesuai dengan kebutuhan faskes	pcs	16,914	147100	1,543,266	154400	3,089,724	162100	3,001,034	153900	3,004,034	161500	3,003,034	161500	3,003,034	940,500	16,644,126	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Monitoring kesesuaian stok alkon faskes dan data yang ada di aplikasi	gerak	45	46	-	46	67,789	51	70,000	56	73,000	61	72,000	61	72,000	321	354,789	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengenalan dan pelatihan aplikasi SIRIKA pada Faskes yang sudah terdaftar di K/O/KB	gerak	-	30	-	41	-	46	-	56	-	61	-	61	-	295	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan pelayanan KB MKJP dan fasilitasi bagi calon akseptor MKJP	Orang	-	4,328	-	4500	1,731,035	4600	1,731,034	4700	1,731,034	4750	1,731,034	4750	1,731,034	27,628	8,655,171	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Pemberian kompensasi kegagalan alkon MKJP	Orang	7,000,000	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	30	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	pembuatan rensi berdasarkan analisa kebutuhan	bulan	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	72	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengadaan alkes penunjang pelayanan KB (almari alkon,iud kit,implant kit,gynbed,laparoscopy)	buah	26 almari	72	1,543,266	1	1,290,900.0	46	1,200,000	56	1,200,000	61	1,200,000	65	1,200,000	301	7,634,166	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	KIE dan pendekatan persuasif	Orang	16,914	15	-	154400	-	162100	-	153900	-	161,500	-	161,500	-	793,415	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	pembinaan jejaring KB	kali	-	30	-	46	-	51	-	56	-	61	-	65	-	309	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	KIE dan konseling	orang	16,914	147100	-	154400	-	162100	-	153900	-	161500	-	163500	-	942,500	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	pelatihan CTU bagi Nakes	orang	-	-	-	46	-	51	-	56	-	61	-	65	-	279	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	mengoperasionalkan Muyan untuk pelayanan KB didaerah2 yg jauh dari faskes	gerak	-	-	-	14257	-	14222	-	14230	-	14335	-	14335	-	71,379	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Pendampingan dan konseling pus pasca persalinan dan keguguran	Orang	14,942	14530	-	14257	-	14222	-	14230	-	14335	-	14335	-	85,909	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	KIE dan fasilitasi calon MOP	orang	-	14	-	20	-	25	-	30	-	35	-	40	-	164	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rakor baksos safari pelayanan KB dengan muslimat aisyiah,bhayangkara,TNI,PK K,Dharma Wanita, Juang kencana, GOW	kali	-	9	105,150	9	1,072,785	9	1,108,160	10	1,104,052	10	213,485	10	213,485	57	3,817,117	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sosialisasi KB dan penggerakan calon akseptor KB pada anggota ormas dan masyarakat	kali	-	1	73,250	1	73,250	1	90,000	1	90,000	1	85,421	1	85,421	6	497,342	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		kali	-	-	-	42	-	42	-	42	-	42	-	42	-	210	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		kali	-	342447	20,525	342447	988,160	342447	988,160	342447	988,000	342447	99,064	342447	99,064	2,054,682	3,182,973	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pelatiham web kampung KB dan movev	kali	-	21	11,375	22	11,375	25	30,000	25	26,052	25	29,000	30	29,000	148	136,802	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				700,000			1,088,800		1,129,160		1,110,000		1,115,000		1,115,000		6,257,960	

			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	terbentuknya kelompok tribina, PIK R dan UPPKS	keg	-		-		-		-		-		-		140	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya sarana edukasi	keg	-		-	244,000		244,000		244,000		244,000		244,000	150	1,220,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting	keg	-		400,000	50,000		70,060		70,000		75,000		75,000	120	740,060	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok binaan	keg	-		200,000	150,000		160,300		140,000		140,000		140,000	71	930,300	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional	org/ bln	-		-	594,800		594,800		594,000		594,000		594,000	20,400	2,971,600	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya sarana untuk kelancaran kegiatan	keg	-		-	-		-		-		-		-	6,800	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal

			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok binaan	keg	-	4	100,000	10	50,000	15	60,000	15	62,000	15	62,000	15	62,000	74	396,000	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok binaan	keg	-	4	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	74	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Terpenuhinya kegiatan dalam penyamaan Presepsi	Kegiat an	-	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	30	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK																-	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Advokasi dan Promosi IPK	sosialisasi dan peningkatan pengetahuan program IPK	orang/ keg	-	-	-	50	-	50	-	50	-	60	-	60	-	270	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Sosialisasi IPK	sosialisasi dan peningkatan pengetahuan program IPK	Orang/ Keg	-	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	30	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Orang/ Keg	-	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	30	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					-		-		-		-		-		-		-	

			Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,																-	-	
			PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok binaan	keg	-	4	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	74	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok binaan	Keg	-	-	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	70	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terpenuhinya kegiatan dalam rangka pembinaan kelompok binaan	Keg	-	-	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	70	-	DP2KBP2 PA Kab Kendal
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	terpenuhinya kegiatan dalam rangka penyebaran Informasi	Keg	-	-	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	25	-	

Tabel 6.2
Target Kerangka dan Pendanaan DP2KBP2PA Kab. Kendal Sesudah Perubahan

Tabel 6.2
Target Kerangka dan Pendanaan DP2KBP2PA Kab. Kendal Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gungja w ab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Tar get	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
Meningkatnya Pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan anak khusus				IPG (indeks pembangunan gender)		92,85 Indeks	92, 95 Indeks		93,05 Indeks		93, 1 Indeks		93,2 Indeks		93,3 Indeks				93,4 Indeks		
	1. Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG danPUHA			Indeks partisipasi kelembagaan PUG danPUHA		92,85 indeks	92, 95 indeks		93,05 indeks		93, 1 indeks		93,2 indeks		93,3 indeks				93,4 indeks		
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																		
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan pelaksanaan PUG	dokumen	-	50	163,425	60	71,075	70	39,000	80	58,000	90	60,000	100	60,000	450	451,500	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kab/Kota	dokumen	-	40	41,075	45	10,000	50	15,000	55	18,000	65	20,000	75	20,000	330	124,075	DP2KBP 2PA Kab Kendal

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kab/Kota	-	-	40	80,000	45	41,075	50	5,000	55	10,000	65	10,000	75	10,000	330	156,075	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangka yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kab/Kota	perangka	-	30	22,350	40	10,000	50	10,000	60	10,000	70	10,000	80	10,000	330	72,350	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah perangka yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kab/Kota	desa	-	25 desa	20,000	25 desa	10,000	25 desa	9,000	25 desa	20,000	25 desa	20,000	25 desa	20,000	150 desa	99,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Perempuan yang mengikuti sosialisasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	43 organisasi	120,000	43 organisasi	10,000	43 organisasi	21,000	43 organisasi	30,000	43 organisasi	30,000	43 Organisasi	30,000	258 organisasi	241,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kab/Kota	-	-	43 organisasi	100,000	43 organisasi	5,000	43 organisasi	10,000	43 organisasi	15,000	43 organisasi	15,000	43 organisasi	15,000	258 organisasi	160,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	-	-	43 organisasi	20,000	43 organisasi	5,000	43 organisasi	11,000	43 organisasi	15,000	43 organisasi	15,000	43 organisasi	15,000	258 organisasi	81,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	43 organisasi	274,385	43 organisasi	234,385	43 organisasi	270,000	43 organisasi	240,000	43 organisasi	250,000	43 organisasi	250,000	258 organisasi	1,518,770	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	lembaga	-	210	100,000	220	60,000	230	100,000	240	70,000	250	80,000	260	80,000	1,410	490,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	-	2 desa	75,635	4 desa	75,635	6 Desa	70,000	8 Desa	80,000	15 Desa	80,000	25 desa	80,000	60 Desa	461,270	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang tersedia	dokumen	100	300	98,750	350	98,750	370	100,000	390	90,000	420	90,000	440	90,000	2,270	567,500	DP2KBP 2PA Kab Kendal

	2. Meningkatnya Penangan kasus kekerasan perempuan dan Anak			%		100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			100 %			
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota			229,010		90,870		99,165		99,165		100,000		100,000		718,210		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/kota	dokumen	#### ##	20	119,010	25	50,870	30	54,165	35	54,165	45	55,000	55	55,000	210	388,210	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peragda yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota	peragda	-	40	110,000	45	40,000	50	45,000	55	45,000	65	45,000	75	45,000	330	220,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewebnangan Kab/Kota	layanan			200,000		112,000		110,000		110,000		110,000		110,000		752,000	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	-	-	100,000	40	55,000	50	50,000	55	50,000	65	50,000	75	50,000	285	200,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	layanan	-	-	100,000	40	57,000	50	60,000	55	60,000	65	60,000	75	60,000	285	297,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota	lembaga			100,000		60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		400,000	

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	laporan	-	0	100,000	50	60,000	50	60,000	50	60,000	65	60,000	75	60,000	290	300,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
	Meningkatnya Penangan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep kaabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus																				
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																		
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dal;am mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kab/Kota	orang			79,017		79,017		105,000		89,000		94,000		94,000		540,034	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peranga yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kab/Kota	peranga	####	40	54,125	45	54,125	50	60,000	55	54,000	60	54,000	75	54,000	325	330,250	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota yang tersedia	dokumen	-	-	24,892	40	24,892	45	45,000	50	35,000	60	40,000	75	40,000	270	184,892	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	orang			10,000		10,000		10,000		11,000		11,000		11,000		63,000	
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Kab/Kota yang tersedia	layanan	-	-	10,000	40	10,000	45	10,000	50	11,000	55	11,000	60	11,000	250	53,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																		

			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota	dokumen			185,325		-		-		-		-		-		185,325	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data gender dan anak kab/kota yang tersedia	dokumen	Tidak ada	-	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	DP2KBP 2PA Kab Kendal	
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota	dokumen	Tidak ada program dan kegiatan	120 orang	185,325	150 orang	-	225 orang	-	250 orang	-	-	-	-	-	185,325	DP2KBP 2PA Kab Kendal	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	lembaga			15,705		20,000		30,000		22,000		30,000		35,000	152,705		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	organisasi	-	-	10,000	60	10,000	60	10,000	60	10,000		10,000		15,000	180	30,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	dokumen	Anggaran di Refocusing	20 orang	5,705	30 orang	10,000	30 orang	20,000	30 orang	12,000		20,000		20,000	140 orang	47,705	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	lembaga			226,575		51,575		70,000		75,000		90,000		85,000	598,150		
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	orang	-	60	21,575	60	21,575	60	25,000	60	30,000		30,000		35,000	240	98,150	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	dokumen	Anggaran di Refocusing	7 desa	155,000	15 desa	5,000	15 desa	5,000	15 desa	5,000		5,000		5,000	52 desa	170,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal

			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informal dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	dokumen	-	-	50,000	5 Desa	15,000	10 Desa	30,000	10 desa	30,000		35,000		35,000	25 Desa	75,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	dokumen	#### ##	40	10,000	45	10,000	50	10,000	55	10,000		20,000		10,000	190	40,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	layanan			15,000		82,190		70,000		70,000		80,000		80,000		397,190	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	orang	-	-	15,000	45	82,190	50	70,000	55	70,000		80,000		80,000	150	222,190	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	layanan			35,000		50,000		230,000		220,000		220,000		220,000			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindubngan khusus mendapatkar layanan pengaduan kewenangan Kab/Kota	orang	-	150	25,000	160	70,000	170	80,000	180	100,000		100,000		100,000	660	475,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	layanan	-	-	10,000	45	150,000	50	150,000	55	120,000		120,000		120,000	150	670,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang	lembaga			20,000		150,000		100,000		100,000	-	120,000	-	120,000		610,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	laporan	-	-	20,000	45	150,000	50	100,000	55	100,000		120,000		120,000	150	350,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal

	Peningkatan Pelayanan Kesertaan Ber Kb bagi Pus																				
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																		
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerinrtah daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	dokumen			36,357		111,617		120,000		105,000		120,000		120,000		612,974	
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kab/Kota	dokumen	-	-	6,357	1	31,617	1	30,000	1	25,000	1	30,000	1	30,000	5	152,974	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah survey/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	dokumen	-	-	5,000	40	15,000	40	15,000	45	15,000	45	15,000	45	15,000	215	80,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	dokumen	-	22	5,000	30	10,000	35	15,000	40	15,000	45	15,000	45	15,000	217	75,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kab/kota	dokumen	-	-	5,000	1	10,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	5	75,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	laporan	-	-	5,000	5	15,000	10	15,000	10	10,000	10	15,000	10	15,000	45	75,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	dokumen	-	-	5,000	5	15,000	10	15,000	10	10,000	10	15,000	10	15,000	45	75,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	organisasi	-	-	5,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	5	80,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	dokumen	-	-	10,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	160,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Bulan/Kegiatan	-	-	5,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	60	80,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal

			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	dokumen	-	-	5,000	288 berkas	15,000	288	15,000	288	15,000	288	15,000	288	15,000	1,152	80,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	dokumen	30	35	118,198	46	287,061	51	272,358	56	273,250	61	272,183	61	272,183	310	1,495,233	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Advokasi Program KBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada <i>stakeholders</i> dan mitra kerja	organisasi	-	-	20,000	50	57,561	50	64,358	50	65,250	60	64,183	60	64,183	270	335,535	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) sesuai kearifan lokal	dokumen	-	-	20,000	60	50,000	60	50,000	60	50,000	80	50,000	90	50,000	350	270,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	unit			20,000	5	121,500	5	100,000	7	100,000	7	100,000	7	100,000	31	541,500	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	keg	1	2	58,198	3	58,000	3	58,000	4	58,000	5	58,000	5	58,000	22	348,198	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	orang			5,961,823		3,428,000		3,427,800		3,427,800		2,881,800		2,881,800		#####	
			Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	-	1,932	69,250	1932	69,200	1932	69,000	1932	69,000	1932	69,000	1932	69,000	11,592	414,450	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	unit	-	20 Kec	5,832,948	20 Keca matan	1,240,000	20 Keca matan	1,240,000	20 Keca matan	1,240,000	20 Keca matan	840,000	20 Keca matan	840,000	-	11,232,948	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	laporan	-	43	59,625	43	746,000	43	746,000	43	746,000	43	746,000	43	746,000	258	3,789,625	DP2KBP 2PA Kab Kendal

			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Orang	-	1,889	-	1889	1,372,800	1889	1,372,800	1889	1,372,800	1889	1,226,800	1889	1,226,800	11,334	6,572,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB	unit	16,914	147,100	1,723,266	2E+05	2,497,900	2E+05	2,497,000	###	2,497,000	161500	#####	###	2,270,000	####	13,755,166	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	gerak	45	46	20,000	46	67,000	51	67,000	56	67,000	61	67,000	61	67,000	321	355,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah akseptor yang mengikuti peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	orang	-	30	20,000	41	20,000	46	20,000	56	20,000	61	20,000	61	20,000	295	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Orang	-	4,328	20,000	4500	1,000,000	4600	1,000,000	4700	1,000,000	4750	1,000,000	4750	1,000,000	27,628	5,020,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	laporan	####	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	30	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	unit	26 almari	72	1,543,266	1	1,290,900	46	1,290,000	56	1,290,000	61	1,063,000	65	1,063,000	301	7,540,166	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	Orang	16,914	15	20,000	154400	20,000	162100	20,000	###	20,000	161,500	20,000	####	20,000	793,415	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	-	30	20,000	46	20,000	51	20,000	56	20,000	61	20,000	65	20,000	309	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	orang	-	-	20,000	46	20,000	51	20,000	56	20,000	61	20,000	65	20,000	279	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	Orang	14,942	14,530	20,000	14257	20,000	14222	20,000	###	20,000	14335	20,000	14335	20,000	85,909	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesetaraan KB pria	orang	-	14	20,000	20	20,000	25	20,000	30	20,000	35	20,000	40	20,000	164	120,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisasi	-	9	305,150	9	1,092,785	9	1,093,200	10	1,093,200	10	993,200	10	993,200	57	5,570,735	

			dan Pembinaan Kesertaan Ber KB																		
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisasi	-	1	73,250	1	73,250	1	74,000	1	74,000	1	74,000	1	74,000	6	442,500	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung kb	dokumen	-	-	200,000	42	20,000	42	20,000	42	20,000	42	20,000	42	20,000	210	300,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di kampung KB	kali	-	342447	20,525	342447	988,160	342447	988,200	###	988,200	342447	888,200	3E+05	888,200	2,054,682	4,761,485	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	kali	-	21	11,375	22	11,375	25	11,000	25	11,000	25	11,000	30	11,000	148	66,750	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelaksanaan pembangunan kelaurag melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	dokumen			650,000		1,038,800		1,079,160		1,060,800		1,065,800		1,065,800		5,960,360	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	unit	-	-	100,000	25	244,000	30	244,000	30	244,000	30	244,000	35	244,000	150	1,320,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	laporan	-	5	100,000	20	50,000	20	70,060	25	70,000	25	75,000	25	75,000	120	440,060	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	orang	-	8	100,000	8	150,000	10	160,300	12	140,000	15	140,000	18	140,000	71	830,300	DP2KBP 2PA Kab Kendal
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	orang	-	-	100,000	3600	444,800	4200	444,800	4200	444,800	4200	444,800	4200	444,800	20,400	2,324,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal

		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	laporan	-	4	100,00	10	50,000	15	60,000	15	62,000	15	62,000	15	62,000	74	396,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	keg	-	4	100,00	10	50,000	15	50,000	15	50,000	15	50,000	15	50,000	74	350,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupann menuju keluarga berkualitas	keluarga	-	-	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	30	300,000	DP2KBP 2PA Kab Kendal
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelaksanaan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	dokumen			50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		300,000	
		Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah organisasi yang mengikuti penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran swerta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekopnomi keluarga/UPPKS)	organisasi			50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	-	300,000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen	-	%		%	-	%										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	-	%	100,000		100,000	100%	5,000	100%	5,000	100%	5,000	100%	5,500	100%	220,500	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyesuaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	-	%	50,000	dokumen	50,000	100%	25,000	100%	20,000	100%	2,500	100%	2,000	100%	149,500	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja peranga	laporan			50,000	laporan	50,000		20,000		7,000		2,500		3,500			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani	orang																

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji setiap bulan terbayarkan	orang	4.927.635	100 %	4,465,631	100%	4,354,681	100%	4,754,681	100%	5,754,681	100%	6,741,681	100%	7,200,000	100%	33,271,355	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	135,000	100 %	104,625	100%	104,625	100%	120,000	100%	120,000	100%	120,000	100%	130,000	100%	699,250	
			Adminitrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangda	dokumen																
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasimperundang undangan	orang	-	1 Tahun	125,000	1 Tahun	125,000	1 Tahun	20,000	1 Tahun	20,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	6 Tahun	340,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelenfkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket		100 %	10,000	100%	10,000	100%	40,000	1 tahun	40,000	1 tahun	40,000	1 tahun	40,000		180,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang			10,000	100%	10,000	100%	25,000	1 tahun	25,000	1 tahun	25,000	1 tahun	25,000		120,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	dokumen																
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	50,000	57 Jenis	35,156	57 Jenis	35,157	57 Jenis	15,000	57 Jenis	50,000	57 Jenis	50,000	57 Jenis	55,000	342 jenis	240,313	
			Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket			5,000		5,000		25,000		25,000		25,000		25,000		110,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket peralatan rumahtangga yang disediakan	paket	20,000	12 Bulan	19,445	12 Bulan	19,445	12 Bulan	25,000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	25,000	12 Bulan	25,000	72 Bulan	133,890	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	13,000	13 Jenis	6,534	13 Jenis	11,494	13 Jenis	20,000	13 Jenis	20,000	13 Jenis	20,000	13 Jenis	27,000	78 Jenis	105,028	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	2,000	2 jenis	3,000	2 jenis	3,000	2 jenis	4,000	2 jenis	4,000	2 jenis	4,000	2 jenis	5,000	12 Jenis	23,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	200,000	12 Bulan	103,127	12 Bulan	86,602	12 Bulan	75,000	12 Bulan	75,000	12 Bulan	125,000	12 Bulan	125,000	72 Bulan	589,729	
			Pernatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	dokumen	-	1 Tahun	-	1 Tahun	100,000	1 Tahun	100,000	1 Tahun	10,000	1 Tahun	30,000	1 Tahun	30,000	6 Tahun	270,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	unit																
			Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit							1	10,000	1	40,000	1	60,000				

			Pengadaan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit							1	10,000	1	30,000	1	35,000			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	20,000	4 Unit	9,966	4 Unit	200,000	4 Unit	25,000	7 Unit	25,000	8 Unit	25,000	10 Unit	80,000	37 Unit	364,966
			Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	paket			4,000		4,000		25,000		25,000		25,000				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			20,000		20,000		25,000		25,000		25,000				
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			50,000		50,000		25,000		25,000		25,000				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	unit															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	2,000	1 Tahun	2,160	1 Tahun	2,160	1 Tahun	3,000	1 Tahun	3,000	1 Tahun	3,000	1 Tahun	3,007	6 Tahun	16,327
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	135,000	1 Tahun	129,155	1 Tahun	129,155	1 Tahun	125,000	1 Tahun	125,000	1 Tahun	140,000	1 Tahun	140,000	6 Tahun	788,310
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		1 Tahun	5,000	1 Tahun		1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	6 Tahun	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	50,000	1 Tahun	123,454	1 Tahun	123,454	1 Tahun	150,000	1 Tahun	140,000	1 Tahun	120,000	1 Tahun	145,000	6 Tahun	801,908
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	80,000	1 Tahun	73,085	1 Tahun	73,085	1 Tahun	50,000	1 Tahun	50,000	1 Tahun	50,000	1 Tahun	50,000	6 Tahun	346,170
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit		1 Tahun	1,000	1 Tahun	1,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	6 tahun	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	Tahun		1 Tahun	5,000	1 Tahun	5,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	25,000	6 tahun	
				jumlah				15,968,574		15,325,083		15,525,364		16399096		16710864		17,212,190		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021. Selain itu, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra DP2KBP2PA.

Keberadaan indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh DP2KBP2PA Kabupaten Kendal. Target kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BPPKB selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur DP2KBP2PA Kabupaten Kendal dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dalduk , KB, PP dan PA

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 206	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Presentase Korban Kekerasa Yang di tangani Intansi Terkait Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100
2	IPG	92,85	92,95	93,05	93,01	93,2	93,3	93,4	93,4
3	Rasio Kekerasam Terhadap Pere,puan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan	4,96	20	20	20	20	20	20	20

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kelahitan Total (TFR)	22,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
2	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Pravelence Rate / mCPR)	65	69	69	70	70	71	71	71
3	Presentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	15,7 7	15	14	13	12	11	10	10

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 untuk **“Kendal, Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan”**. dimaksudkan sebagai perencanaan bagi DP2KBP2PA Kabupaten Kendal untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kendal sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kendal. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

8.2 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026 adalah selama Lima Tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra tahun 2021 – 2026 dapat di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal tahun 2021 -2026

8.3 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak tahun 2021–2026 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik memerlukan dukungan dari seluruh komponen di PD. Oleh karena itu Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan dan anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga visi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak tahun 2021–2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra DP2KBP2PA Tahun 2021-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Tahun 2021–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kendal, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan dan anak Tahun 2021–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Renstra

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Kendal, 23 November 2022
Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KENDAL



GIBI KUSUMA, S.H., MM.
Pembina

NIP 19760607 200312 1 008

LAMPIRAN

LAMPIRAN



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050 / 312 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 – 2026 TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan atau/ dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No. 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 49 Seri D No. 4);
 23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

1. Ketua bertugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
2. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Perencanaan dan Keuangan, bidang Umum dan Kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Kesekretariatan Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bertugas :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana :
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

- Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. dan
- g. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, bertugas :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
 - g. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertugas :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
6. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dan Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Anggota Kelompok

Kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 September 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Peringgal.

CASCADING DP2KBP2PA

NO	TUJUAN:			
	1	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender peningkatan perlindungan per		
	2	Peningkatan Kualitas Kesehatan Melalui Pengendalian Jumlah Penduduk, dan Peningkatan Peserta KE		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,95	93,05	93,01	93,02	93,03
2	TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2

empuan Layak
3

2026
93,04
2,2

CASCADING DP2KBP2PA

No	SASARAN STRATEGIS:
1	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
3	Meningkatnya penanganan kasus perdagangan orang dan peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep KLA dan perlindungan anak khusus
4	Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
5	Peningkatan layanan kekerasan ber KB bagi Pasangan usia subur (PUS)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prosentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase OPD yang mengimplementasikan PUG	%	50	50	75	100	100	100
3	Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	%	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase OPD yang memiliki data pilah gender	%	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase kecamatan layak anak	%	45	60	65	70	100	100
7	Prosentase kekerasan pada anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
8	Prosentase penurunan usia pernikahan dini	%	20	20	20	20	20	20
9	Prosentase kebutuhan ber KB yang terpenuhi (unmeet need)	%	15	14	13	12	11	10
10	Prosentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahterah yang dibina	%	60	60	65	70	75	80

CASCADING DP2KBP2PA

NO	PROGRAM:								
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota							
	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemeberdayaan Perempuan							
	3	Program Perlindungan Perempuan							
	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga							
	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak							
	6	Program Pemenuhan Hak Anak							
	7	Program Perlindungan Khusus Anak							
	8	Program Pengendalian Penduduk							
	9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)							
	10	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcom	Satua n	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya & mengembangkannya kemampuan Aparatur & memberikan pelayanan Prima	Presentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya prosentase OPD yang mengimplementasikan PUG	Jumlah OPD yang mengumpulkan PPRG	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya prosentase layanan kekerasan terhadap perempuan yang di tangani	Jumlah korban kekerasan yang terlayani & tertantangi	%	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	%	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender	Jumlah OPD yang mengumpulkan data pilah gender kuantitatif	%	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya jumlah kecamatan layak anak	Jumlah yang lounching layak anak	%	45	60	65	70	100	100
7	Meningkatnya prosentaselayanan kekerasan terhadap anak	Jumlah Korban kekerasan pada anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100
8	Menurunnya Usia pernikahan dini	Jumlah penurunan usia pernikahan dini	%	20	20	20	20	20	20
9	Meningkatnya layanan bagi kebutuhan ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah prosentase kebutuhan ber Kb bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	%	15	14	13	12	11	10
10	Meningkatnya prosentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan & peningkatan keluarga sejahtera yang dibina	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan keluarga yang dibina	%	60	60	65	70	75	80

CASCADING DP2KBP2PA

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN:
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
12	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
13	Administrasi Umum Perangkat
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
15	Penyediaan Peralatan rumah tangga
16	Penyediaan bahan Logistik Kantor
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
24	Pengadaan Mebel
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
27	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
31	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
32	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
34	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
35	Pemeliharaan Mebel
36	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
37	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
40	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
41	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
42	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
43	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
44	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
45	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
46	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
47	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
48	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
49	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
51	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
52	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
53	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
54	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
55	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

56	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
57	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
59	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan</i>
60	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
63	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</i>
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
66	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
67	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
69	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>
70	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota
71	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
72	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
73	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>
74	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
76	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
77	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
78	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
79	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
80	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
81	<i>Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk</i>
82	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Program KKBPK
83	Penyusunan dan pemanfaatan Grand design kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
84	Dukungan Pelaksanaan survei /pendataan Indeks pembangunan berwawasan kependudukan
85	Penguatan kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal
86	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokasi Kabupaten/Kota
87	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan non Formal
88	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur informal di Kelompok kegiatan Masyarakat Binaan
89	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak Kependudukan kepada pemangku kepengantingan
90	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya</i>
91	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra kerja
92	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal
93	Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK
94	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
95	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>
96	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
97	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencana(PKB/PLKB)
98	Penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
99	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota
100	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota
101	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB

102	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
103	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP
104	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
105	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB
106	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
107	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
108	Peningkatan Kesertaan KB Pria
109	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
110	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB
111	Integrasi Pembangunan Lintas sektor di Kampung KB
112	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
113	Pembinaan Terpadu Kampung KB
114	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
115	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)
116	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
117	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana /kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
118	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
119	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
120	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
121	Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

No	Sasaran sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcom	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangda	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangda	%	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen
2	dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangda	%	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen
3	Laporan realisasi dan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi konerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	%	100%laporan	100%laporan	100%laporan	100%laporan	100%laporan	100%laporan
4	Dokumen Adminstrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	ASN yang menerima gaji	Jumlah orang yang menerima gaji	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
6	dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	%	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen	100%dokumen
7	laporan evaluasi kinerja perangda	Jumlah laporan kinerja perangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian perangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Paket Pakaian dinas dan atributnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Dokumen monev penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen minitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11	ASN yang mengikuti diklat	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang
12	Orang yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
13	dokumen administrasi umum perangda	Jumlah dokumen administrasi umum perangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	laporan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Unit gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Unit sarpras gedung kantor	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Laporan jasa penunjang urusan pemda	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	laporan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	laporan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

32	laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	laporan Jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	Jumlah laporan Jasa pemeliharaan barang milik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	laporan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	laporan mebel yang dipelihara	Jumlah laporan mebel yang dipelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	laporan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jumlah laporan sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Dokumen kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
38	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kab/Kota	dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen
39	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	DRPPA	DRPPA	1 DRPPA	5 DRPPA	10 DRPPA	10 DRPPA	10 DRPPA
40	Perangda yang melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangda yang melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	opd	0	0	0	48 OPD	48 OPD	48 OPD
41	Perangda yang melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangda yang melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	opd	0	0	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD
42	Dokumen pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
43	Dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah dokumen sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
44	Organisasi yang melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial	Jumlah Organisasi yang melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW	1 organisasi GOW
45	Dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
46	Lembaga advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	lembaga	0	0	1	1	1	1

47	Sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	70	130	200	200	200	200
48	Dokumen pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1
49	Dokumen peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kab/Kota	Doc	1	1	1	1	1	1
50	Perangda yang mengadvokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenagan kab/kota	Perangda yang mengadvokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenagan kab/kota	perangda	1	1	1	1	2	2
51	Dokumen pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	100%	100%	100%
52	Layanan komperehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlidungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Kabupaten / Kota yang tersedian	Jumlah layanan komperehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlidungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Kabupaten / Kota yang tersedian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
53	Dokumen pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/Kota	jumlah dokumen pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/Kota	dokumen	0	1 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
54	Dokumen penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kab/Kota	dokumen	0	0	2 dokumen	3 dokiume n	3 dokiume n	3 dokiume n
55	Dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota	dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
56	Dokumen pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
57	Organisasi yang mengadvokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pmerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintyah, media dan dunia usaha	lembaga	0	0	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	5 lembaga

58	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab.kota	dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
59	Dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
60	Peserta yang mengikuti kegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	orang	40	80	170	170	170	170
61	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	Jumlahn dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
62	Dokumen pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	dokumen	100	150	120	120	120	120
63	Dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
64	Layanan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah layanan untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	layanan	20 Layanan	25 Layanan	25 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	35 Layanan
65	Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota	orang	20	25	30	30	35	35
66	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah tersedianya Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

69	Laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
71	Layanan untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	Jumlah layanan untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
72	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
73	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	layanan	30 layanan	40 layanan	55 layanan	60 layanan	65 layanan	70 layanan
74	Anak yang memerlukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kab/Kota	layanan	15 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	25 Layanan	30 Layanan	35 Layanan
75	Layanan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	layanan	15 Layanan	20 Layanan	35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan	35 Layanan
76	Laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
77	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	orang	50 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang

78	Dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah Dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
79	Dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kab/Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
80	Dokumen dukungan pelaksanaan survei / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan survei / pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
81	Dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidiakn kependudukan jalur pendidian non formal	Jumlah Dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidiakn kependudukan jalur pendidian non formal	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
82	Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidiakn kependudukan jalur penendidikan formal sesuai isu lokal Kab/Kota	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidiakn kependudukan jalur penendidikan formal sesuai isu lokal Kab/Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
83	Laporan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Jumlah Laporan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	%	10 %	15 %	20 %	25 %	30	40 %
84	Dokumen implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	Jumlah Dokumen implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
85	Organisasi yang mengikuti advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah Organisasi yang mengikuti advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	%	0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
86	Dokumen pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
87	Organisasi advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	%	2 %	5%	10 %	15 %	20 %	25 %
88	Dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	%	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %

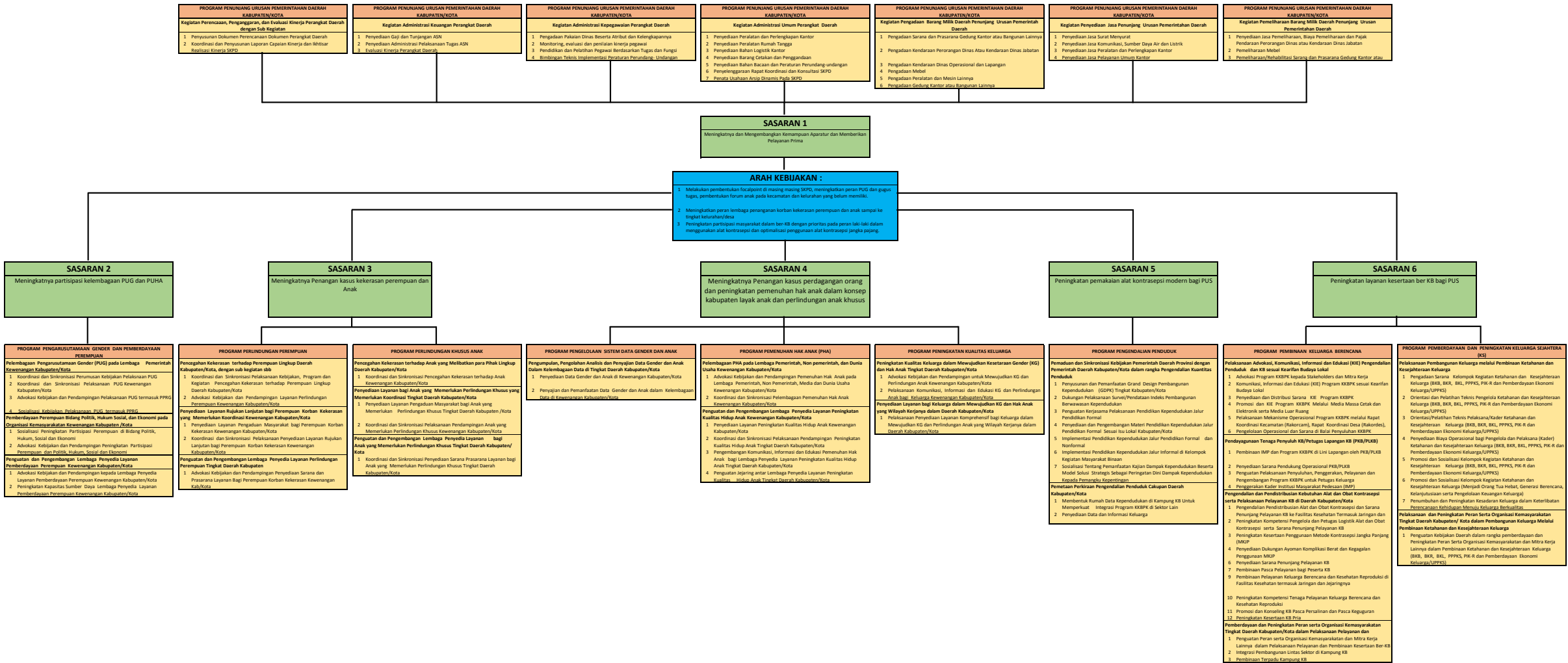
89	Unit penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	%	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
90	Dokumen promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	%	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %
91	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	orang	1927	1927	1927	1927	1927	1927
92	Organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP danprogram bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB	organisa si	1	1	1	1	1	1
93	Sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Unit	38 Unit	38 Unit	39 Unit	40 Unit	41 Unit	42 Unit
94	Laporan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
95	Kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	orang	1927	1927	1927	1927	1927	1927
96	Laporan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
97	Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

98	Orang yang berkompeten mengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah akseptor yang mengikuti peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	orang	55	68	69	70	70	70
99	Orang yang mengikuti penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3000 orang	3500 orang	4000 orang	4500 orang	4500 orang	4500 orang
100	Laporan tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan ayomkomplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
101	Tersedianya unit sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	unit	1	1	1	1	1	1
102	Peserta KB yang terbina pasca pelayanan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	orang	400	410	420	430	440	450
103	Laporan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
104	Meningkatnya kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	orang	5	5	5	5	5	5
105	mempromosikan dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	orang	400	410	420	430	440	450
106	Meningkatnya kesertaan KB pria	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesetaraan kb pria	orang	11	11	11	11	11	11
107	Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan kesertaan ber KB	Jumlah pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisa si	68	68	68	68	68	68
108	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisa si	68	68	68	68	68	68
109	Terintegrasinya pembangunan lintas sektor di kampung KB	dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	dokume n	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

[illegible]

119	penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	keluarga	0	0	0	10	10	10
120	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran sewrta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	organisa si	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg
121	Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi yang mengikuti penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	organisa si	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg

CROSS CUTTING DP2KB2PA KABUPATEN KENDAL



INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV_SETARA
DP2KBP2PA KABUPATEN KENDAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JABATAN ESELON	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB	SASARAN KEGIATAN	TARGET					
											2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7		8							
1	Meningkatnya dan mengembangkan kemampuan Aparatur dan memberikan pelayanan prima		Sekretaris	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB / KOTA	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Koordinator PEP dan Keuangan	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat Daerah	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat Daerah	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi dan capaian kinerja	100% laporan	100% laporan	100% laporan	100% laporan	100% laporan	100% laporan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat	Dokumen Adminstrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	ASN yang menerima gaji	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n	100% dokume n
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	laporan kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Kasubag Umpeg	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8	Jumlah rencan Kebutuhan barang SKPD	dokumen administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket Pakaian dinas dan atributnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	10	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen monev penilaian kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	11	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	ASN yang mengikuti diklat	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang
							Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	Orang yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
							Administrasi Umum Perangkat	13	Jumlah administrasi umum perangkat	dokumen administrasi umum perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	14	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Peralatan rumah tangga	15	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan bahan Logistik Kantor	16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	20	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pmda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	22	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	23	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan Mebel	24	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket mebel yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	26	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	27	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit sarpras gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan jasa penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	30	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	31	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	32	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pmda	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	34	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Pemeliharaan Mebel	35	jumlah mebel yang dipelihara	mebel yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%

							Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	36	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA	Jumlah Partisipasi Kelembaaagn PUG dan PUHA	Kabid PPPA	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	aktifnya POKJA PUG,Tim Penggerak PUG,Focal point OPD, Guus tugas KLA	Sub koordinator PUG dan PUHA	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	37	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintah	laporan lembaga PUG	laporan	1	1	1	1	1
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	38	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenagan Kabupaten/Kota	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG	0	0	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	39	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 desa Ramah perempuan dan peduli anak	0	1 DRPPA	5 DRPPA	10 DRPPA	10 DRPPA	10 DRPPA
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang didampingi dalam pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0	0	0	48 OPD	48 OPD	48 OPD
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	41	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD dan Desa	0	0	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD
						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempeuan	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	42	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempeuan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Penerima Sosialisasi Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	160	0	70	140	150	150

						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	44	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Organisasi Perempuan mendapatkan Advokasi Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5	0	5	10	12	12
						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	46	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban mendapatkan advokasi dan pendampingan (LPKI)	0	0	1	1	1	1
						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah orang perempuan mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas berbasis Industri Rumah	70	130	200	200	200	200
						Sub koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Kelompok organisasi masyarakat perempuan mendapatkan KIE di kab. Kendal	29	30	30	30	30	30
3	Meningkatnya partisipasi kelembagaan PUG dan PUHA					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
						subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangda	1	1	1	1	2	2
						subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	51	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	lembaga penyedia layanan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	2 lembaga	2 lembaga

						Sub koordinator PUG dan PUHA	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	52	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan PUSPAGA	0	0	0	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang dan Peningkatan PHA Dalam Konsep KLA dan Perlindungan Anak Khusus		Kabid PPPA	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Sub koordinator PUG dan PUHA	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53	Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	54	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen data gender dan anak, profil anak, profil KLA (data dari PD terkait)	0	0	2 dokume n	3 dokiume n	3 dokiume n	3 dokiume n
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	55	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen SIGA	0	44%	50%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG dan PUHA		Kabid PPPA	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Sub koordinator PUG dan PUHA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	56		Dokumen	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	57	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi PUHA dengan Lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia uasaha	0	0	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	5 lembaga
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	58	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi PUHA	1 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	59	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan GSIB dan jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak	40	80	170	170	170	170

						Sub koordinator PUG dan PUHA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan GSIB dan jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	150	120	120	120	120
						Sub koordinator PUG dan PUHA	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Perempuan dan Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait	Kabid PPPA	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	64	Jumlah layanan untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Layanan	20 Layanan	25 layanan	25 Layanan	30 layanan	30 layanan	35 layanan
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	65	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	25	30	30	35	35
						Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Korban perempuan yang mengadu terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	68	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 Layanan	25 Layanan	25 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	35 Layanan

					Tersedianya Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sub koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
8	Peningkatan Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern bagi PUS		Kabid PPkb	PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah satuan Pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuwalitas Penduduk	78		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Penyusunan dan pemanfaatan Grand design kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	79	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota	OPD	0	20	30	40	45	45
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Dukungan Pelaksanaan survei /pendataan Indeks pembangunan berwawasan kependudukan</i>	80	Jumlah Survei/pendataan indeks Pembangunan berwawasan kependudukan	OPD dan Masyarakat	0 %	0%	10%	15 %	20 %	25 %
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Penguatan kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal</i>	81	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal	Sekolah Tingkat SD, MI, SMP dan MTS	10 %	15 %	20 %	25 %	30	40 %
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokasi Kabupaten/Kota</i>	82	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokasi Kabupaten/Kota	OPD	0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan non Formal</i>	83	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	0 %	2 %	5%	10 %	15 %	20 %	25 %
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur informal di Kelompok kegiatan Masyarakat Binaan</i>	84	Jumlah dokumen Hasil pendidikan Kependudukan jalur informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 %	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
						Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	<i>Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak Kependudukan kepada pemangku keentingan</i>	85	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak Kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	0 %	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
9	Peningkatan Layanan Kesertaan ber KB bagi PUS		Kabid KS PK	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	86	Jumlah KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
						Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakkan	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	87	Jumlah Organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	%	2 %	5%	10 %	15 %	20 %	25 %

						Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakkan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	88	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	%	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
						subkoordinator pendayagunaan PLKB dan IMP	Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	89	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (Pembangunan, keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana)	%	2 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
						Subkoordinator advokasi dan penggerakkan	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	90	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	%	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %
						subkoordinator pendayagunaan PLKB dan IMP	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	91	Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	orang	1927	1927	1927	1927	1927	1927
						subkoordinator pendayagunaan PLKB dan IMP	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	92	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	1	1	1	1	1	1
						subkoordinator pendayagunaan PLKB dan IMP	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	93	Jumlah sarana Pendukung operasional PKB/PLKB	Unit	38 Unit	38 Unit	39 Unit	40 Unit	41 Unit	42 Unit
						Subkoordinator Jaminan ber KB	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencana(PKB/PLKB)	94	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) untuk petugas keluarga berencana/ penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						Subkoordinator pendayagunaan PLKB dan IMP	Penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	95	Jumlah kader yang mengikuti penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	orang	1927	1927	1927	1927	1927	1927
						Subkoordinator Jaminan ber KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	96	Jumlah laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						Subkoordinator Jaminan ber KB	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota	97	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						Subkoordinator jaminan ber KB	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	98	Jumlah akseptor yang mengikuti peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	orang	55	68	69	70	70	70
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	99	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3000 orang	3500 orang	4000 orang	4500 orang	4500 orang	4500 orang
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	100	Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	101	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	unit	1	1	1	1	1	1
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB	102	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	orang	400	410	420	430	440	450

						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	103	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan reproduksi di jaringan dan jejaringnya	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi	104	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	orang	5	5	5	5	5	5
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	105	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	orang	400	410	420	430	440	450
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Peningkatan Kesertaan KB Pria	106	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesetaraan KB pria	orang	11	11	11	11	11	11
						Subkoordinator jaminan ber KB	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	107	Jumlah laporan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisasi	68	68	68	68	68	68
						subkoordinator pembinaan kesertaan ber KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	108	Jumlah organisasi yang memndapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	organisasi	68	68	68	68	68	68
						Subkoordinator jaminan ber KB	Integrasi Pembangunan Lintas sektor di Kampung KB	109	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	dokumen	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n
						Subkoordinator jaminan ber KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	110	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di kampung KB	kampung KB	42 kampun g KB	42 kampun g kb	43 kampun g kb	45 kampun g kb	46 kampun g kb	47 kampun g kb
						Subkoordinator jaminan ber KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	111	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	dokumen	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n
10	Peningkatan Layanan Kesertaan ber KB bagi PUS		Kabid KS PK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	112	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan keluarga melauai pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	doc	1	1	1	1	1	1
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	113	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	114	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	laporan	5 orang	20 orang	20 orang	25 orang	25 orang	25 orang
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana /kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	115	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	orang	8 keg	8 keg	10 keg	12 keg	15 keg	18 keg

						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	116	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	orang	0	3600 org/bln	4200 org/bln	4200 org/bln	4200 org/bln	4200 org/bln
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	117	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Laporan	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ((Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	118	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	119	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	keluarga	0	0	0	10	10	10
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	120	Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	organisasi	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg
						Subkoordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga	Penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	121	Jumlah organisasi yang mengikuti penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	organisasi	10 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg	15 keg

[illegible][illegible]

KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PERMUDAAN KELUARGA	
Saracen	
1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat di bidang Pemberdayaan dan Pemangkinan Keluarga Sejahtera yang diukur	Indikator Saracen
1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pendampingan	

[illegible]